

BAB IV

SEJARAH DAN GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah *Asia Pacific Network for Sex Workers* (APNSW)

The Asia Pacific Network for Sex Workers merupakan jaringan regional yang secara masif dijalankan oleh, dengan, dan untuk individu, komunitas, dan organisasi yang menaungi *sex workers* di kawasan Asia Pasifik (APNSW, <https://www.nswp.org/featured/asia-pacific-network-sex-workers-apnsw>, 2020). Pada tahun 1990, bertempat di Paris, diadakan *The 2'nd International Conference For NGO's Working On AIDS* yang kemudian melandasi pembentukan NSWP (*Global Network of Sex Work Projects*) sebagai aliansi aktivis dalam mengupayakan hak-hak pekerja seks dalam proyek yang berlangsung pada *The 1992 International AIDS Conference* di Amsterdam. Konferensi mengenai isu AIDS ini terus diselenggarakan hingga pada tahun 1994, APNSW secara resmi diluncurkan untuk pertama kalinya di Yokohama, Jepang.

Sebagai sebuah *Non-Government Organization*, APNSW resmi dibentuk pada tahun 1992 dan terhitung sejak tahun 2018, secara sukses telah berhasil menaungi 38 anggota yang berasal dari 24 negara berbeda di seluruh kawasan Asia Pasifik meliputi *national sex workers networks*, *sex worker-led organizations*, dan *sex works projects* (APNSW, APNSW Vacancy Announcement, 2018). Pembentukan APNSW ditujukan sebagai respon atas adanya kehadiran urgensi rekonstruksi kebijakan yang mengatur kegiatan operasional *sex workers* yang mencakup eliminasi akan fenomena kekerasan fisik dan seksual, diskriminasi, deskriminalisasi pekerja seks, pelanggaran hak asasi manusia serta tuntutan akan keadilan sebagaimana warga negara lainnya terkhusus di kawasan Asia Pasifik.

Bergerak secara independen, APNSW juga turut mendampingi dan memberdayakan setiap lembaga perwakilan dari negara-negara anggota dengan harapan agar dengan mandiri dapat mencari pemasukan dan bantuan secara finansial seperti halnya lembaga usaha koperasi di salah satu kota di India, Kolkata, yang menginspirasi dalam bidang peluang perbankan dan kredit bagi para *sex workers* (Amaliasari, 2019). Selain itu, melalui *Veshya Anyay Mukti Parishad* (VAMP) (salah satu lembaga kolektif pekerja seks yang ditujukan untuk mengeksplorasi dampak upaya anti-*human trafficking* pada program pencegahan HIV), berlokasi di Sangli India, APNSW secara langsung juga turut memobilisasi organisasi tersebut dengan membentuk model program pemberdayaan yang dapat mencegah dan mengurangi intensitas kekerasan seksual serta menekan kriminalisasi agar kedepannya profesi sebagai *sex workers* dapat menjadi opsi pekerjaan yang aman untuk dilakukan (Ahmed & Seshu, 2010)..

4.2 Visi, Misi, Tujuan, Tuntutan dan Nilai-Nilai Utama *Asia Pacific Network for Sex Workers* (APNSW)

Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan melalui situs resmi *Asia Pacific Network for Sex Workers*, adapun visi dan misi, tujuan, tuntutan dan nilai-nilai utamayang ingin dicapai dari adanya kehadiran lembaga tersebut adalah sebagai berikut.

4.2.1 Visi APNSW

Lembaga ini berfokus kepada pemberian pengakuan terhadap *sex workers* sebagai sebuah profesi pekerjaan yang layak dan setiap *sex workers* memiliki hak atas perlindungan dan partisipasi yang didasarkan kepada asas penentuan nasib sendiri.

4.2.2 Misi APNSW

Selayaknya sebuah lembaga pada umumnya, visi yang dimiliki oleh APNSW tentunya didukung oleh beberapa misi yang dijadikan landasan dalam mengambil gerakan maupun kebijakan. Adapun 3 orientasi penting yang ingin dicapai oleh APNSW sebagai sebuah NGO antara lain :

- a. Mewakili, memobilisasi, dan turut memberdayakan komunitas *sex workers* perempuan, laki-laki, dan transgender yang berada di kawasan Asia Pasifik.
- b. Bertugas untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh *sex workers* di kawasan Asia Pasifik.
- c. Memberikan dukungan dan fasilitas secara penuh aksi dekriminalisasi terhadap *sex workers*.

4.2.3 Tujuan APNSW

Berfokus kepada pemberian pelayanan kepada masyarakat luas, sebuah NGO tentunya memiliki tujuan yang secara eksklusif ditujukan sesuai dengan orientasi kepentingan dan spesifikasi isu yang menjadi alasan pertimbangan dibentuknya NGO tersebut. Dalam hal ini, adapun tujuan yang dimiliki oleh APNSW antara lain :

- a. Menciptakan solidaritas dan mempromosikan nilai-nilai kepemimpinan pada seluruh *sex workers* perempuan, laki-laki, dan transgender di kawasan Asia dan Pasifik.

- b. Menghadirkan advokasi dalam konteks hak-hak *sex workers* mencakup aksesibilitas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan non-diskriminatif termasuk HIV, STI dan kesehatan reproduksi.
- c. Membangun mekanisme regional untuk mempengaruhi kebijakan dan program melalui pertukaran informasi dan pengalaman.
- d. Menentang pelanggaran hak asasi manusia, stigma dan diskriminasi serta labelisasi dalam hal negatif terhadap *sex workers*.
- e. Melakukan audiensi terhadap pemerintah dalam rangka penghapusan hukum dan kebijakan yang sangat mempengaruhi martabat, mata pencaharian, kondisi kerja dan kualitas hidup *sex workers*.

4.2.4 Tuntutan APNSW

Adapun tuntutan yang dilayangkan oleh APNSW kepada pemerintah dan tatanan masyarakat sosial yaitu :

- a. Penghapusan pelanggaran HAM terhadap *sex workers*.
- b. Mengikutsertakan *sex workers* pada setiap forum politik dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi organisasi.
- c. Penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap *sex workers* mencakup keluarga.
- d. Pemberian aksesibilitas kepada layanan kesehatan dengan kualitas yang sama sebagaimana masyarakat umum termasuk akses terhadap HIV, TB, pengobatan dan pencegahan Malaria.
- e. Dekriminalisasi dan reformasi hukum serta kebijakan lainnya yang memungkinkan *sex workers* dapat bekerja dengan aman, dan partisipasi penuh sebagai warga negara.

4.2.5 Nilai-Nilai Utama APNSW

Berdasarkan pendapat Miller, sebuah lembaga atau perusahaan yang sukses ialah perusahaan yang memiliki nilai-nilai yang mampu menciptakan inovasi dan budaya baru dalam menghadapi kompetisi secara global mencakup pengembangan kualitas perilaku sumber daya di dalamnya (Prof. Dr. H. Edy Sutrisno, 2010). Beberapa *core values* yang dihadirkan oleh APNSW sepanjang sepak terjang organisasi tersebut dalam tatanan masyarakat sosial antara lain sebagai berikut.

- a. Menjunjung tinggi perilaku etis dengan cara mematuhi kebijakan organisasi, menunjukkan integritas dalam memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan transparan, mematuhi kewajiban hukum organisasi serta akuntabilitas kepada setiap anggota.
- b. Mempertahankan budaya hormat, kepercayaan, dan persatuan dalam komunitas *sex workers* dengan terus mengadvokasi setiap anggota.
- c. Berlatih dan menjunjung tinggi kebijakan non-diskriminasi dalam semua keterlibatan anggota, termasuk pemberian dukungan dan perekrutan anggota baru.
- d. Dalam kemitraan dengan anggota organisasi, PBB dan lembaga internasional lainnya seperti pihak donor, organisasi berbasis agama, dan media eksternal untuk membangun dukungan dimobilisasi untuk mendukung visi dan misi organisasi.
- e. Membangun kemitraan dengan organisasi yang dapat menyebarkan nilai-nilai organisasi dan mempromosikan hak asasi manusia *sex workers*.

4.3 Tantangan APNSW Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap *Sex Workers* Di India

Upaya pemberian perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah India terhadap *sex workers* memerlukan perhatian khusus terlebih mengenai bagaimana kebijakan distribusi bantuan yang ditetapkan. Banyak dari masyarakat marginal yang kesulitan untuk memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas penyediaan bantuan seperti kesediaan dokumen resmi dan *ration cards* yang menjadi syarat wajib dalam mendapatkan bantuan. Hal ini menjadi salah satu fokus utama dan tantangan bagi APNSW untuk bisa menaungi *sex workers* tersebut mengingat NGO juga berperan penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Menanggapi situasi tersebut, adapun tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan berupa distribusi bantuan terhadap *sex workers* di India (Ray, 2021) antara lain sebagai berikut.

- a. Banyaknya jumlah *sex workers* yang tidak memiliki dokumen persyaratan dan kartu sembako. Hal ini semakin diperparah dengan adanya eksistensi kebijakan berupa undang-undang yang mengatur tentang pekerja seks, yang secara tidak langsung membatasi dan menghambat aksesibilitas kelompok masyarakat tersebut dalam memperoleh status kependudukan.
- b. *Durbar Mahila Samanwaya Committee* (DMSC) sebagai salah satu lembaga yang berperan sebagai representasi APNSW di India telah melakukan diskusi terhadap *sex workers* untuk menghentikan aktivitas pelayanan konsumen selama dan setelah periode *lockdown* berlangsung. Tetapi pada kenyataannya, hal ini justru berdampak kepada terancamnya keberlangsungan hidup para *sex workers* akibat kehilangan pendapatan.

- c. Bantuan pangan dianggap tidak mampu mengakomodasi setiap kebutuhan yang menjadi indikator kehadiran perlindungan terhadap *sex workers* di India. Selain bahan-bahan pangan, kebutuhan lain seperti sabun, *hand-sanitizer*, disinfektan, masker, dan uang tunai sebesar 1.000 Rupee bagi setiap pekerja seks/bulan juga diharapkan mampu diberikan kepada *sex workers* di India.
- d. Tidak adanya perlindungan pemerintah India bagi setiap *sex workers* yang ingin bepergian (kembali ke tempat asal) meskipun telah mematuhi peraturan protokol seperti pemeriksaan kesehatan, karantina, dan isolasi. Di beberapa tempat, rasisme dan diskriminasi berbasis gender juga masih kerap terjadi yang pada akhirnya berdampak kepada bagaimana tindakan preventif terhadap penyebaran virus Covid-19 dilakukan.
- e. Penyebaran informasi dan himbuan dari pemerintah India terhadap masyarakat seperti pedoman kesehatan, kebersihan dan medis masih sangat buruk. Hal ini mengingat pemilihan lokasi dan wilayah yang kurang strategis dan daya visibilitas yang sangat rendah.
- f. Kurangnya tindakan kooperatif dari pemerintah India untuk bisa mendukung inisiatif APNSW sebagai NGO dalam memberikan informasi dan himbuan terhadap *sex workers* mengenai praktik perilaku dan kebersihan seksual sesuai dengan anjuran pemerintah